
Analisa Kebijakan Pemerintah Terkait Ancaman Pengangguran Pasca Kenaikan Inflasi pada DKI Jakarta

Hery Haryanto¹, Febryna Adinda², Helen³, Lara Meilani⁴, Valeska Lilya Kevin⁵, Vallencia⁶

¹ Department of Management, Faculty of Economics and Business, Universitas Internasional Batam

² Department of Management, Faculty of Economics and Business, Universitas Internasional Batam

³ Department of Management, Faculty of Economics and Business, Universitas Internasional Batam

⁴ Department of Management, Faculty of Economics and Business, Universitas Internasional Batam

⁵ Department of Management, Faculty of Economics and Business, Universitas Internasional Batam

⁶ Department of Management, Faculty of Economics and Business, Universitas Internasional Batam

ABSTRACT

Unemployed are people or people who have not got a job, are looking for work and have lost their job or are not working at all. This study aims to analyze Government Policy Related to the Threat of Unemployment Post-Inflation Increase in DKI Jakarta. The research method used in this research is by using quantitative methods. The object of analysis will be obtained from BPS or the Central Statistics Agency. BPS is an institution that deals with censuses and statistics. The results show that the numbers can affect a state's income because not having income can cause economic problems and poverty. Therefore, government policies are urgently needed to overcome this unemployment.

Keywords:

Unemployment, Government, Inflation

✉ Corresponding author :

Email Address : larameilani0604@gmail.com

1. Pendahuluan

Pengangguran adalah orang-orang atau masyarakat yang belum mendapat pekerjaan, mencari pekerjaan, dan kehilangan pekerjaan atau tidak bekerja sama sekali. Pengangguran sendiri merupakan salah satu isu yang tidak akan pernah habis dalam sejarah dunia, tak terkecuali di Indonesia. Pada tahun 2021, tingkat pengangguran di Indonesia berada pada angka 6,49% atau sekitar 9,10 juta penduduk. Angka tersebut sudah menurun dibanding tahun 2020 yaitu sebanyak 9,77% persen akibat pandemi Covid-19. Namun pengangguran juga bisa disebabkan oleh faktor yang lain yaitu inflasi. Kenapa inflasi bisa menyebabkan angka pengangguran meningkat? Hal ini dikarenakan harga barang yang terus naik dan permintaan tenaga kerja yang sedikit, persoalan ini menyebabkan ketidakseimbangan sehingga terjadinya penurunan jumlah permintaan tenaga kerja. Pada mata kuliah Teori Ekonomi Makro ini kami diminta untuk menentukan satu provinsi di Indonesia kemudian dianalisis jumlah pengangguran provinsi tersebut. Melalui diskusi yang telah kelompok kami lakukan, kelompok kami memutuskan untuk mengambil data Provinsi DKI Jakarta sebagai bahan penelitian kami.

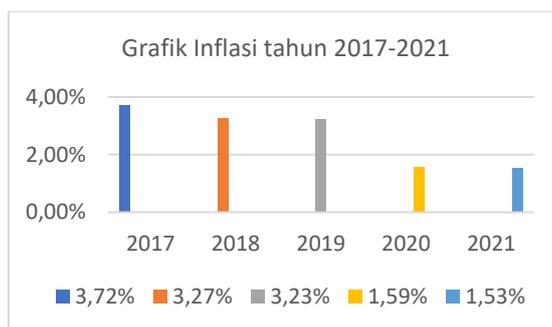
Dalam data yang telah disajikan oleh Badan Pusat Statistik DKI Jakarta tingkat pengangguran di Jakarta pada tahun 2017 mencapai angka 7,14% dan pada akhir tahun 2021 didapati tingkat pengangguran naik lagi menjadi 8,50%. Angka yang naik tersebut disebabkan oleh Covid-19 yang terjadi di awal tahun 2020 dan masih merajalela di tahun 2021 yang menyebabkan banyak buruh atau karyawan kehilangan pekerjaan mereka. Selain itu, inflasi yang terjadi di DKI Jakarta mengalami penurunan di tahun 2021 yaitu sebesar 1,53% dibanding tahun 2020 yang mencapai angka 1,59%. Diketahui inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga minyak goreng tetapi untuk komoditas dan jumlah moneter dikontrol dengan baik oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) DKI Jakarta dan Bank Indonesia. Tujuan kami menganalisis tingkat pengangguran di DKI Jakarta adalah untuk mengetahui jumlah pengangguran di DKI Jakarta pada lima tahun terakhir yaitu 2017-2021. Serta menemukan solusi apa yang bisa dilakukan pemerintah terkait masalah pengangguran ini yang diakibatkan oleh inflasi.



Gambar 1. Grafik Pengangguran DKI Jakarta tahun 2017-2021

Sumber: BPS 2017-2021

Pada grafik diatas dapat dilihat bahwa angka pengangguran di DKI Jakarta memiliki tingkat pengangguran yang cukup tinggi yaitu angka 7,14% pada tahun 2017 kemudian turun di tahun 2018 dengan angka 6,24% lalu angkanya hampir sama di tahun 2019 kemudian naik jauh di angka 10,95% pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19 lalu mulai menurun di tahun 2021 karena sudah ada protokol kesehatan yang perlu dipatuhi apabila ingin membuka usaha seperti biasa, sebagai contoh Peduli Lindungi.



Gambar 2. Grafik Inflasi tahun 2017-2021

Sumber: Statistik Jakarta 2017-2021

Pada data yang terlampir di atas dapat dilihat bahwa tingkat inflasi di tahun 2017 menempati angka tertinggi yaitu sebesar 3,72% dan turun menjadi 3,27% di tahun 2018. Kemudian pada tahun 2019 angka inflasi turun sedikit menjadi 3,23% kemudian turun drastis pada tahun 2020 sebesar 1,59% dan turun sedikit menjadi 1,53% pada akhir tahun 2021. Alasan inflasi yang rendah pada tahun 2020-2021 dikarenakan adanya pandemi Covid-19 dan pasokan yang tersedia dan Bank Indonesia dan pemerintah yang bersedia menjaga kestabilan harga.

2. Tinjauan Pustaka

Pengangguran

Istilah “Pengangguran” memang sudah tidak asing lagi untuk didengar baik di setiap daerah, provinsi, dan kabupaten atau kota, dikarenakan keberadaan seorang pengangguran

Analisa Kebijakan Pemerintah Terkait Ancaman Pengangguran Pasca Kenaikan Inflasi

tidak dapat dihindari posisinya, baik pada negara maju maupun pada negara yang berkembang, dimana tiap masing-masing negara sudah pasti memberikan pendapat yang berbeda dalam mendefinisikan apa itu pengangguran. Pengangguran adalah kondisi pada seseorang yang termasuk atau digolongkan kedalam pilihan angkatan kerja yang tidak mempunyai pekerjaan, serta secara aktif termasuk dalam kategori sedang dalam proses mencari pekerjaan.. Ketetapan yang dicirikan sebagai perilaku yang berulang dan juga konsisten dilakukan, dan membuatnya untuk menaatinya dikatakan sebagai kebijakan (Suharto, 2008:7).

Kebijakan saat ini banyak dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran ini, salah satu tujuannya adalah pembangunan nasional yang dinilai mampu untuk meningkatkan sistem kinerja perekonomian untuk menciptakan peluang atau lapangan kerja dan membantu menata mensejahterakan ataupun kehidupan layak bagi penduduk Indonesia. Istilah pengangguran ini juga dikenal sebagai salah satu dari penyakit ekonomi. Dimana penyakit ekonomi ini harus segera dikurangi karena termasuk dalam permasalahan yang kompleks dan juga bersifat multidimensional. Pengangguran yang banyak melanda sebagian besar masyarakat ini ternyata akan berdampak pada kemiskinan yang senantiasa harus untuk dikaji secara terus menerus.

Namun pendapat mengenai kebijakan pada umumnya akan ditentukan oleh isi kebijakan itu sendiri, dimana isi dan konteks kebijakan ini akan mempengaruhi implementasi kebijakan yang dimana akan meliputi kepentingan, serta kekuasaan yang terlibat (Marilee S Grindle, Samodra 1944, 22-24). Dikarenakan kebijakan yang dikatakan dapat mempengaruhi bahkan dapat mengancam pengangguran diperlukan penelitian mendasar untuk mendukung keberhasilan pencegahan dari meningkatnya pengangguran.

Inflasi

Inflasi jika dikaitkan dengan ilmu ekonomi merupakan serangkaian proses terjadi peningkatan harga-harga secara umum yang berhubungan dengan mekanisme pasar. Peningkatan harga-harga ini dapat terjadi dikarenakan oleh beberapa faktor, seperti meningkatnya konsumsi atau kebutuhan dari masyarakat, likuiditas di pasar yang berlebihan pada pasar dimana dapat memicu spekulasi konsumsi yang banyak, dan termasuk juga terjadi pada distribusi barang yang mengalami ketidaklancaran. Inflasi dibagi menjadi empat tipe atau golongan, yaitu Inflasi Ringan, Inflasi Sedang, Inflasi Berat, dan juga Hiperinflasi. Inflasi ringan dapat terjadi apabila kenaikan harga menunjukkan angka di bawah 10% setahun, Inflasi sedang berkisar antara 10%-30% setahun, Inflasi berat berkisar antara 30%-100%

Analisa Kebijakan Pemerintah Terkait Ancaman Pengangguran Pasca Kenaikan Inflasi

setahun, dan hiperinflasi atau biasa disebut sebagai inflasi tak terkendali dapat terjadi jika harga naik berada pada angka di atas 100% setahun (Wikipedia; 2011).

Inflasi merupakan harga yang mengalami kenaikan secara terus menerus, dimana harga yang mengalami kenaikan itu terjadi pada seluruh kelompok barang dan juga jasa. Dapat diambil kesimpulan bahwa hal yang paling terpenting adalah kenaikan harga umum barang secara terus menerus pada suatu periode. (Pohan; 2008) Kecenderungan harga yang terus naik secara umum, pada semua barang dan meluas disebut sebagai inflasi, sedangkan jika harga mengalami kenaikan pada satu atau dua barang saja tidak dapat disebut sebagai inflasi (Boediono; 1982).

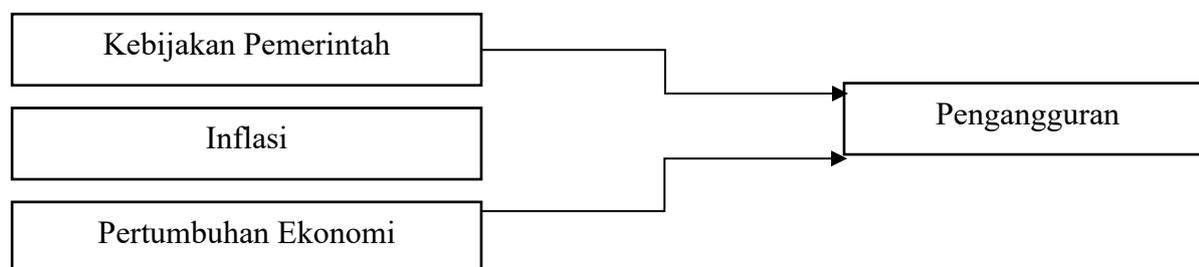
Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi disebutkan sebagai suatu kegiatan yang mengalami perkembangan dalam hal perekonomian dimana menyebabkan tingkat produksi dan jasa pada masyarakat turut serta bertambah dan kemakmuran masyarakat juga meningkat Sukirno (2011:331). Sedangkan menurut Boediono, bahwa pertumbuhan ekonomi itu adalah suatu proses dimana *output* perkapita mengalami kenaikan dalam jangka yang panjang.

Terdapat tiga faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu: 1) Akan terjadi akumulasi modal karena ada sebagian pendapatan sekarang yang kemudian ditabung dan diinvestasikan kembali sebagai tujuan untuk memperbesar *output* di masa-masa mendatang, 2) Adanya hubungan pertumbuhan penduduk dengan kenaikan jumlah angkatan kerja tradisional yang dapat dianggap sebagai faktor positif dalam memupuk pertumbuhan ekonomi. Dengan arti, bahwa semakin banyaknya tenaga kerja maka tenaga kerja akan semakin produktif, dan semakin banyak penduduk itu akan meningkatkan potensi pasar domestik. 3) Kemajuan teknologi lama yang banyak berubah ke teknologi baru.

Kerangka Berpikir

Adapun kerangka berpikir yaitu sebagai berikut:



Pada kerangka yang ada diatas, dijelaskan bahwa kebijakan pemerintah, kemudian inflasi, dan pertumbuhan ekonomi merupakan indikator terjadinya pengangguran menurut kami. Dalam suatu indikator ekonomi makro, pokok permasalahan yang terjadi pada

Analisa Kebijakan Pemerintah Terkait Ancaman Pengangguran Pasca Kenaikan Inflasi

pertumbuhan ekonomi bisa diartikan secara positif maupun negatif. Hal yang perlu dan wajib untuk diperhatikan pada permasalahan ekonomi jika kita lihat dari adanya pendapatan per kapita yang mengalami peningkatan ialah gejala inflasi/harga. Inflasi dapat mencerminkan kestabilan dari harga dan juga ekonomi. Karena semakin tinggi inflasi maka akan semakin tinggi pula harga dan juga perekonomian pada suatu negara. Dan inflasi juga tidak selalu senantiasa berhubungan dengan meningkatnya harga-harga barang dan juga jasa, namun juga bersangkutan dengan kemampuan daya beli dari masyarakat. Dimana upah banyak menentukan daya beli dari masyarakat.

Pengangguran termasuk dalam permasalahan yang akan selalu diperhatikan dengan terus menerus terutama pada negara-negara berkembang, seperti Indonesia. Karena besarnya angka dari pengangguran yang terjadi di negara-negara berkembang terjadi akibat sempitnya lapangan kerja yang ada dan jumlah penduduk yang besar.

3. Metodologi

Semua data yang akan digunakan sebagai objek analisa akan didapatkan dari BPS (Badan Pusat Statistik). BPS merupakan lembaga yang mengurus terkait sensus dan statistik (Statistik, Profil BPS, n.d.).

Fokus dari analisis ini adalah kebijakan pemerintah terkait ancaman pengangguran pasca kenaikan inflasi, yang artinya kita akan menganalisa kebijakan pemerintah pasca kenaikan inflasi dan bagaimana dampaknya terhadap pengangguran. Populasi yang menjadi target analisa kami adalah warga Provinsi DKI Jakarta, Indonesia dan sampel dalam penelitian ini adalah data pengangguran, inflasi, dan data penduduk usia 15 tahun ke atas pada tahun 2017-2021.

Secara metode, kami akan menggunakan metode penelitian kuantitatif karena kuantitatif merupakan proses penelitian dengan menggunakan sumber atau data berupa angka sebagai alat untuk menganalisis apa yang ingin diketahui (Hidayat, 2012). Data berupa angka tersebut akan didapatkan dari Badan Pusat Statistik. Data yang kami analisis merupakan data sekunder yang artinya data yang diambil dari sumber lain oleh peneliti dikarenakan data-data yang kami butuhkan berupa informasi penting seperti sensus penduduk dan tidak bisa langsung kami yang turun tangan ke lapangan mempertimbangkan jarak dan waktu (Dqlab, 2021). Keaslian dari data yang kami gunakan pun bisa dipegang karena data yang didapatkan langsung dari Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta sebagai pusat sensus penduduk Indonesia.

Setelah data yang dibutuhkan sudah terkumpulkan, kelompok kami akan melakukan analisa menggunakan rumus terkait pengangguran sesuai yang telah diajarkan. Adapun yang menjadi fokus penelitian yaitu: 1. Kebijakan pemerintah pasca inflasi di DKI Jakarta, 2. Ancaman pengangguran di DKI Jakarta, 3. Dampak pengangguran terhadap roda perekonomian di DKI Jakarta, 4. Pengaruh pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi di DKI Jakarta, 5. Dampak inflasi pada pengangguran di DKI Jakarta.

Selain itu, kami menggunakan rumus untuk mengukur tingkat pengangguran dengan rumus sebagai berikut:

1. Angkatan kerja = jumlah yang dipekerjakan + jumlah pengangguran
2. Tingkat pengangguran/*Unemployment rate* = $100 \times (\text{pengangguran}) / (\text{angkatan kerja})$
3. Populasi = angkatan kerja + tidak dalam angkatan kerja
4. Tingkat partisipasi angkatan kerja: $100 \times (\text{angkatan kerja}) / (\text{populasi})$

Setelah menggunakan rumus di atas, analisa akan dijabarkan mengenai angkatan kerja, tingkat pengangguran, populasi, dan tingkat partisipasi angkatan kerja. Setelah analisa berdasarkan rumus dijabarkan, kami akan menjabarkan solusi atau cara mengatasi pengangguran secara umum dan cara mengatasi pengangguran dari pemerintahan yang bisa dijadikan acuan untuk membantu mengurangi pengangguran di DKI Jakarta.

4. Hasil dan Pembahasan

Pengaruh pengangguran pada pertumbuhan ekonomi

Untuk menilai pengaruh pengangguran pada pertumbuhan ekonomi, akan diukur berbagai statistik untuk meringkas keadaan pasar tenaga kerja.

Berikut pada tabel 1 merupakan data penduduk usia 15 tahun keatas yang termasuk angkatan kerja, pengangguran, dan tidak dalam angkatan kerja di Provinsi DKI Jakarta pada periode 2017-2021.

Tabel 1. Data Penduduk Usia 15 tahun ke atas

	2017	2018	2019	2020	2021
Bekerja	4,509,171	4,726,779	4,836,977	4,659,251	4,737,415
Pengangguran	346,945	314,841	320,901	57,278	439,899
Tidak dalam angkatan kerja	2,980,288	2,842,399	2,800,557	2,967,663	3,089,042

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Tabel 2 Data yang Sudah Dijumlahkan Berdasarkan Rumus

	Angkatan Kerja	Tingkat Pengangguran	Populasi	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
2017	4,856,116	7.14%	7,836,404	61.97%
2018	5.041,620	6.24%	7,884,019	63.95%
2019	5.157,878	6.22%	7,958,435	64.81%
2020	4,716,529	1.21%	7,684,192	61.38%
2021	5,177,314	8.50%	8,266,356	62.63%

Pada tabel 2 merupakan data sudah dijumlahkan berdasarkan rumus angkatan kerja, tingkat pengangguran, populasi, dan tingkat partisipasi angkatan kerja.

Diketahui:

1. Pada tahun 2017, tingkat partisipasi angkatan kerja DKI Jakarta mencapai 61,97% dan tingkat pengangguran 7,14%. Dapat dilihat bahwa pada tahun 2017 angka angkatan kerja masih cukup tinggi.
2. Pada tahun 2018, tingkat partisipasi angkatan kerja DKI Jakarta mencapai 63.95% dan tingkat pengangguran 6.24% dapat dilihat bahwa pada tahun 2018 mengalami kenaikan partisipasi angkatan kerja sebesar 1.98% dan mengalami penurunan angka pengangguran sebesar 0.9%.
3. Pada tahun 2019, tingkat partisipasi angkatan kerja DKI Jakarta mencapai 64.81% dan tingkat pengangguran 6.22%. dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 mengalami kenaikan lagi dibanding tahun 2017 dan 2018.
4. Pada tahun 2020, tingkat partisipasi angkatan kerja DKI Jakarta mengalami penurunan 61.38% dibanding tahun lalu dikarenakan populasi yang menurun juga. Pada tingkat pengangguran juga mengalami penurunan dengan total 1.21 %, dimana jika dibandingkan dengan tingkat pengangguran tahun sebelumnya, angka tersebut cukup dinilai baik karena semakin kecil angka pengangguran, maka pertumbuhan ekonomi akan menjadi stabil.
5. Pada tahun 2021, tingkat partisipasi angkatan kerja DKI Jakarta mengalami kenaikan 62.63% dibanding tahun lalu. Sedangkan untuk tingkat pengangguran mengalami kenaikan sebesar 8.50%, dimana angka tersebut merupakan angka tertinggi dari tahun 2017 sampai 2021.

Dengan adanya tingkat pengangguran tersebut akan mempengaruhi pendapatan negara. Karena pengangguran tidak memiliki pendapatan, sehingga daya beli masyarakat berkurang,

Analisa Kebijakan Pemerintah Terkait Ancaman Pengangguran Pasca Kenaikan Inflasi

yang dimana akan mengurangi pendapatan negara dari masyarakat seperti pajak, sewa, dan lain-lain. Penurunan kegiatan ekonomi ini secara tidak langsung mempengaruhi roda perekonomian negara sehingga menyebabkan stagnasi pertumbuhan ekonomi. Selain itu, pengangguran tidak hanya berdampak pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dapat meningkatkan jumlah kemiskinan.

Dampak inflasi pada pengangguran

Negara-negara berharap untuk mencapai tingkat kegiatan ekonomi pada tingkat beban kerja penuh tanpa inflasi. Para ekonom mengakui bahwa pengangguran yang rendah menyebabkan masalah inflasi dan inflasi yang tinggi. Sebaliknya, ketika ada masalah pengangguran yang parah, tingkat harga tetap relatif stabil. Semakin tinggi tingkat pengangguran, semakin rendah tingkat pertumbuhan upah. Jadi ada *trade-off* antara inflasi dan pengangguran.

Hal ini karena inflasi tidak didorong oleh permintaan agregat melainkan oleh pengganda, tetapi oleh faktor-faktor lain yang tidak berpengaruh pada penyerapan tenaga kerja dalam jangka panjang seperti, naiknya harga BBM akan mempengaruhi harga barang dan jasa seperti tarif dasar listrik, kenaikan cukai rokok, dan lain-lain. Tingkat inflasi yang tinggi dapat mempengaruhi kapasitas produksi pada tingkat permintaan yang tentunya mempengaruhi daya beli masyarakat dan mengganggu pertumbuhan ekonomi. Ini berarti bahwa tingkat pengangguran berkemungkinan untuk meningkat seiring dengan kenaikan inflasi.

Cara mengatasi pengangguran

Cara mengatasi pengangguran secara umum dapat dilakukan dengan beberapa solusi, diantaranya adalah:

1. Memperluas lapangan kerja
2. Memperkecil jumlah angkatan kerja
3. Meningkatkan kualitas pekerjaan untuk tenaga kerja yang ada

Cara mengatasi pengangguran dari pemerintah dapat dilakukan melalui beberapa solusi, diantaranya adalah:

1. Bank sentral harus memangkas suku bunga dan Departemen Keuangan akan meningkatkan pengeluaran pemerintah, yang dapat menyebabkan pemotongan pajak.
2. Memperluas kesempatan kerja dengan memperluas produksi, meningkatkan investasi, menyediakan infrastruktur, meningkatkan ekspor, dan menggalakkan program padat karya dimana akan melibatkan lebih banyak pekerja dalam proses produksi.
3. Mengurangi urbanisasi untuk mencegah pengangguran di kota-kota besar.

Analisa Kebijakan Pemerintah Terkait Ancaman Pengangguran Pasca Kenaikan Inflasi

Kebijakan pemerintah yang mengancam munculnya pengangguran

Penyebab terjadinya pengangguran tidak hanya oleh kondisi ekonomi, pembangunan sektor ekonomi yang tidak realistis, rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan, akan tetapi juga disebabkan oleh kebijakan pemerintah. Berikut merupakan beberapa kebijakan pemerintah yang mengancam munculnya pengangguran:

1. Sumber daya manusia yang rendah

Hal ini dikarenakan sistem pendidikan yang belum memadai dan masih sedikitnya kesempatan untuk mendapatkan pelatihan yang layak. Pemerintah seharusnya menerapkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan sumber daya manusia dengan cara meningkatkan sistem pendidikan dengan studi banding, pelatihan, dan memonitor pengembangan SDM.

2. UMK/Pengupahan Rendah

Banyak pekerja memiliki skill yang terampil tetapi memilih untuk menganggur untuk mencari lagi dikarenakan gaji yang kurang cocok. Sebagian perusahaan demi mendapatkan keuntungan dari karyawan dengan memaksimalkan gaji mereka sebatas jumlah UMK. Hal tersebut memicu sebagian karyawan untuk berhenti bekerja dan mencari lapangan kerja di luar negeri dengan gaji yang lebih tinggi. Selain itu, ada peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 yang dinilai membagikan tenaga kerja yang buruk bagi buruh dengan memberikannya upah yang rendah juga.

5. Simpulan

Pengangguran adalah orang-orang atau masyarakat yang belum mendapat pekerjaan, mencari pekerjaan dan kehilangan pekerjaan atau tidak bekerja sama sekali. Pada tahun 2021 tingkat pengangguran di Indonesia berada pada angka 6,49% atau sekitar 9,10 juta penduduk. Angka tersebut sudah menurun dibanding tahun 2020 yaitu sebanyak 9,77% persen akibat pandemi Covid-19. Pengangguran tersebut akan mempengaruhi pendapatan negara. Karena pengangguran tidak memiliki pendapatan, sehingga daya beli masyarakat berkurang, yang dimana akan mengurangi pendapatan negara dari masyarakat seperti pajak, sewa, dan lain-lain. Penurunan kegiatan ekonomi ini secara tidak langsung mempengaruhi roda perekonomian negara sehingga menyebabkan stagnasi pertumbuhan ekonomi. Selain itu, pengangguran tidak hanya berdampak pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dapat meningkatkan jumlah kemiskinan. Pengangguran pada suatu negara akan meningkat seiring dengan kenaikan inflasi oleh karena itu kebijakan pemerintah sangat diperlukan untuk mengatasi pengangguran dan inflasi. Ada beberapa cara mengatasi pengangguran yaitu: 1. Memperluas lapangan kerja, 2. Memperkecil jumlah angkatan kerja, 3. Meningkatkan kualitas

- Sari, B. (2021, November 6). *Kesempatan Kerja dan Pengangguran*. Retrieved from Dosen Yai: https://dosen.yai.ac.id/v5/dokumen/materi/030013/70_20210611100314_Pertemuan%2011-Ekonomi%20Makro_Tenaga%20Kerja%20dan%20Pengangguran.pdf
- Statistik, B. P. (n.d.). *Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Termasuk Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja di Provinsi DKI Jakarta (Jawa), 2019-2021*. Retrieved from Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta: <https://jakarta.bps.go.id/indicator/6/1064/1/penduduk-usia-15-tahun-ke-atas-yang-termasuk-angkatan-kerja-dan-bukan-angkatan-kerja-di-provinsi-dki-jakarta.html>
- Statistik, B. P. (n.d.). *Profil BPS*. Retrieved from Badan Pusat Statistik: <https://www.bps.go.id/menu/1/tentang-profil-bps.html#:~:text=Badan%20Pusat%20Statistik%20adalah%20Lembaga,7%20Tahun%201960%20tentang%20Statistik>.
- Statistik, B. P. (n.d.). *Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi DKI Jakarta Menurut Kabupaten/Kota (Persen), 2019-2021*. Retrieved from Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta: <https://jakarta.bps.go.id/indicator/154/84/1/tingkat-pengangguran-terbuka-tpt-provinsi-dki-jakarta-menurut-kabupaten-kota.html>